

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM PERISTIWA PELENGSERAN PRESIDEN FERDINAN EMMANUEL EDRALIN MARCOS DI FILIPINA TAHUN 1983-1986

Marjono, Kayan Swastika, Sri Handayani dan Clip Anggara S.

E-mail: marjono@unej.ac.id

***Abstract:** American intervention in the government of President Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos related to the economic crisis, political, social in Philippines. The development of communist ideology supports the growing crisis in Philippines and it influences the interests of America that related to the economic and politics in both countries. The purpose of this study is to provide new knowledge about the politics in Southeast Asia with America around the 20th century, especially the leadership of Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos in Philippines. This study applied the method of historical research using a heuristics technique or a sources selecting, a source criticising, an interpretation, and historiography. American intervention overthrows the power of Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos through military field and political field. America utilizes a conspiracy between the high officials RAM (Reform the Army Movement), the diplomacy senator from the part of President Reagan to the government of Philippines, and support to the opposition under Cory Aquino. This research be expected can later material or reference for historical research, and add the knowladge history student about the political situation and interntional relations in Southeast Asia region since 1990, especeally Philippines.*

Keywords: *American intervention, President.Marcos*

PENDAHULUAN

Intervensi Amerika Serikat dalam menjatuhkan kekuasaan Presiden Ferdinan E. Marcos berkaitan erat perkembangan paham komunis dan liberal negra Filipina (William, 2014: 300). Perkembangan ideologi komunis di Filipina berdampak pada pihak Amerika Serikat yang berusaha menjatuhkan kedudukan Marcos. Ferdinan E. Marcos yang dianggap sudah tidak menguntungkan bagi pihak Amerika Serikat, menyudutkan posisinya di dalam perpolitikan pemerintah Amerika Serikat di Washington (Jajak & Sudarmin, 1989: 26). Dalam melakukan intervensi, Amerika Serikat berusaha masuk dan menguasai aspek-aspek penting didalam pemerintahan Filiina. Politik, Ekonomi dan Sosial termasuk Militer menjadi target utama pihak Amerika Serikat dalam usahanya mengintervensi kedudukan Marcos agar dapat dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden Filipina.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini meliputi alasan Amerika serikat melakukan intervensi dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferdinan E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986; bentuk dan proses intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferdinan E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986; serta dampak dari intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferdinan E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986.

Tujuan dan manfaat dari kajian ini adalah untuk mengkaji latar belakang Amerika Serikat melakukan intervensi dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferinan E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986; mengkaji bentuk dan proses intervensi Amerika Serikat dalam

Drs. Marjono, M.Hum, Drs.Kayan Swastika, M.Si., Dr.Sri Handayani adalah Dosen Prodi. Pendidikan Sejarah FKIP UNEJ. C. Anggara. S., S.Pd, adalah alumni FKIP UNEJ

peristiwa pelengseran Presiden Ferdinand E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986; dan untuk mengkaji dampak dari intervensi Amerika Serikat dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferdinand E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena selama ini perkembangan dan peranan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara khususnya Filipina masih jarang dibahas. Selain itu, intervensi serta konspirasi Amerika Serikat dalam usahanya menjatuhkan Ferdinand E. Marcos yang pada mulanya didukung sebagai tangan kanan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, karena sudah tidak menguntungkan bagi Amerika secara sepihak diputuskan untuk berbalik menjatuhkannya. Manfaat dari kajian ini bagi mahasiswa, dapat menambah penguasaan materi sejarah politik dan hubungan Internasional kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah metode penelitian sejarah meliputi empat tahap, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (penulisan) (Gottschalk, 1975: 18). Heuristik, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan intervensi Amerika Serikat dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferdinand E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986. Pengumpulan sumber penelitian diperoleh peneliti melalui Perpustakaan, Toko buku, jurnal ilmiah, serta koleksi pribadi.

Kritik, kritik sumber dilakukan secara intern dan ekstern. Pada kegiatan kritik intern peneliti memperoleh fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi dan dibandingkan. Interpretasi, peneliti berusaha menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah terhimpun. Fakta satu dengan fakta lainnya dikaitkan, sehingga memperoleh kesimpulan yang sedekat mungkin dengan kebenaran, meskipun terdapat sudut pandang (subjektivitas) peneliti. Peneliti melakukan penafsiran terhadap intervensi Amerika Serikat dalam peristiwa pelengseran Presiden Ferdinand E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986 dengan cara membandingkan dan menghubungkan makna dari fakta-fakta sejarah yang telah diuji melalui kritik dan interpretasi. Historiografi, peneliti menyusun hasil interpretasi dari fakta-fakta sejarah, sehingga menjadi suatu kisah yang selaras, mudah dimengerti, dan dapat dibuktikan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam usahanya menjatuhkan kekuasaan Ferdinand E. Marcos dilakukan melalui konspirasi dengan berbagai elit berkepentingan, baik dalam pemerintahan Reagan maupun pemerintahan Marcos. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dilakukan melalui berbagai sektor, terutama bidang Militer dan Politik. Intervensi dilakukan baik secara rahasia oleh lembaga CIA maupun secara langsung oleh para diplomat Amerika Serikat. Berikut diuraikan hasil kajian ini (Bresnan, 1988:324).

Latar Belakang Amerika Serikat Melakukan Intervensi dalam Peristiwa Pelengseran Presiden Ferdinand E. Marcos di Filipina tahun 1983-1986

Keadaan Filipina dibawah kekuasaan Ferdinand E. Marcos hingga tahun 1983 memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Filipina telah mengalami kemerosotan perekonomian yang cukup tajam. Perkembangan ideologi komunis pada akhir tahun 1983 yang sejak pemberlakuan UU Darurat 1972 telah mampu diredam, kembali muncul dan berkembang akibat dari krisis yang kian memburuk. Konflik internal pemerintahan Amerika Serikat antara partai pendukung Presiden Reagan dengan partai oposisi dibawah partai Liberal sangat mempengaruhi putusan kedepan atas kedudukan Amerika Serikat di

Filipina. Skap keras kepala Presiden Reagan yang disinyalir memiliki kepentingan pribadi dalam mendukung kedudukan Ferdinan E. Marcos. Munculnya peristiwa pembunuhan Senator Benigno Aquino pada 14 Agustus 1983 menjadi latar belakang utama Amerika Serikat melakukan intervensi ke negara Filipina.

Krisis Filipina dibawah Kekuasaan Presiden Ferdinan E. Marcos

Keadaan perekonomian serta politik yang semakin memburuk menjadi alasan kuat pihak oposisi pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan intervensi terhadap pemerintahan Marcos. Terjadinya pergolakan politik antara pendukung Aquino dengan kekuasaan Marcos menimbulkan Filipina masuk kedalam kondisi darurat. Pertumbuhan ekonomi Filipina telah menyentuh angka 3,8% di tahun 1981 dan 2,6% tahun 1982. Defisit rekening giro menanjak dari \$2,29 milyar pada tahun 1981 menjadi \$ 3,33 milyar dalam 1982 (Dalam Djiwandoko, 1987:884). Pertumbuhan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) negara Filipinaterus menurun dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Negara-negaraASEAN tahun 1981-1986

	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Indonesia	7,9	2,2	4,2	6,1	1,9	3,2
Malaysia	6,9	5,9	6,3	7,8	-1,03	1,0
Filipina	3,4	1,9	1,1	-6,8	-3,8	0,1
Singapura	9,9	6,3	7,9	8,1	-1,8	1,9
Muangthai	6,3	4,1	5,8	6,2	4,0	4,2

Sumber: *Internasional Financial Statistics*, Juni 1987, kecuali tahun 1985 dan 1986 dari sumber-sumber terpercaya (Dalam Djiwandoko, 1987:884).

Perkembangan Komunis Filipina dibawah Kekuasaan Presiden Ferdinan E. Marcos

Perkembangan komunis setelah penetapan UU Darurat 1972 dan konstitusi 1973 semakin menunjukkan progres yang menanjak. Menurut Menteri Pertahanan, Juan Porce Enrile menyebutkan bahwa jumlah komunis di tahun 1981 yang tercatat dalam daftar anggota NDF diperkirakan mencapai 800 ribu orang. Sementara itu, selain anggota NDF gerakan NPA telah tersebar luas di 34 wilayah Provinsi dengan kekuatan persenjataan kurang lebih 10 ribu pucuk senjata dan terus meningkat disetiap tahunnya. Bahkan liputan *Newsweek* ditahun 1985 tercatat gerakan komunis dibawah NPA telah tersebar di 59 wilayah dan 73 Provinsi se-Filipina dengan kekuatan persenjataan mencapai 15 ribu pucuk senjata (Thayib, 1986:27)

Perkembangan komunis terus mengalami peningkatan paska pembunuhan Senator Benigno Aquino pada tahun 1983. Pembunuhan Aquino telah menarik masa pendukungnya dan momentum bagi pihak oposisi untuk lebih berani melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintahan Marcos (Nadeak K. dan Atmadji, 1986:75). Pada tahun 1983 jumlah anggota NPA dan CCP telah meningkat keangka 30.000 anggota dan 20.000 gereliyawan di 53 Provinsi. Perkembangan komunis tetap tidak bisa dibendung oleh pemerintah dan terus menakuti Marcos serta kepentingan Amerika Serikat di Filipina (Bayan KO dalam TSM: Teknologi & Atrategi Militer, 1988:16).

Konflik Politik Internal Pemerintahan Amerika Serikat

Sebagai negara yang menganut dual-Partai, munculnya perpecahan didalam pengambilan putusan pemerintah cenderung akan lebih sering terjadi. Sebagai Presiden

yang diusung oleh partai Republik, kekuatan Reagan masih belum mampu memonopoli suara dari seluruh kongres pemerintahannya. Partai Republik sebagai golongan sayap kanan dari pemerintahan Jimi Carter yang menjabat sebelumnya tergolong baru mendapatkan dominasi sekitar tahun 1980-an. Kiprah partai Republik bahkan sempat menghilang paska kemenangan presiden Barry Goldwater tahun 1964 (Francis W, ed. Keith W. O. 2004:416).

Perpecahan kedua kubu dalam pemerintahan menciptakan dua kelompok yang saling berkepentingan. Kelompok konservatif dibawah pengaruh Presiden Reagan dan kelompok liberal yang masih condong kearah presiden Jimmy Carter yang memegang pengaruh di Departemen Luar Negeri, Pentagon dan CIA. Oleh karena itu, meskipun jabatan kepresidenan dipegang oleh Reagan sebagai wakil dari partai Republik, keputusan masih berat sebelah ketangan partai Demokrat karena sebagian besar DPR dan anggota kongres masih dikendalikan oleh kekuasaan partai Demokrat. Perbedaan kubu Reagan dengan oposisi berkaitan dengan posisi Amerika Serikat dalam pemerintahan Ferdinand E. Marcos, terus mendukungnya atau berbalik merebut kekuasaan pemerintahan Filipina (Seagrave, 1988:464).

Proses Intervensi Amerika Serikat Dalam Peristiwa Pelengseran Presiden Ferdinand E. Marcos Di Filipina

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam upaya mengintervensi kedudukan Ferdinand E. Marcos terutama dalam bidang politik dan militer berdampak cukup tajam. Ketergantungan Ferdinand E. Marcos terhadap bantuan Amerika Serikat menjadikannya rentan akan kebijakan-kebijakan Amerika. Krisis yang terjadi di Filipina serta kebangkitan oposisi dibawah pimpinan Corrry Aquino berserta partai-partai nasionalis yang berhaluan komunis mengharuskan Amerika Serikat harus cepat bertindak. Dukungan kepada Marcos dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Keterbukaan partai oposisi menerima dukungan Amerika juga menjadi poin penting dalam proses intervensi, dimana kekuatan Ny. Aquino dalam merebut kekuasaan masa terlihat lebih meyakinkan bagi Amerika kedepannya.

Intervensi Dalam Bidang Militer

Keberadaan pangkalan militer Angkatan Laut di Subic dan pangkalan militer Angkatan Udara di Clark merupakan hal yang mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi melalui militer. Adanya 18.000 tentara yang berada dipangkalan tersebut akan sangat membahayakan jika kekuatan militer jatuh pada tangan oposisi. Amerika Serikat sendiri berusaha untuk memegang kendali pusat kemiliteran melalui intervensi-intervensi terhadap pihak pemerintahan Ferdinand E. Marcos. Hal ini berkaitan erat dengan memanasnya pemilihan umum yang akan diadakan tahun 1986 sangat mengawatirkan pemerintahan Amerika Serikat. Dikhawatirkan apabila kekuatan militer tetap dipegang oleh Ferdinand E. Marcos nantinya akan menimbulkan krisis yang semakin panjang, karena militer dianggap sebagai tangan kanan suksesti keberhasilan Ferdinand E. Marcos dalam pemilu oleh rakyat Filipina (Thoyib, 1986:49).

Pengalihan Kekuasaan Kemiliteran dibawah Pimpinan Fidel Ramos

Pada Oktober 1985 diadakan Konferensi strategi rahasia yang diselenggarakan di Washington guna menyusun rencana apa yang akan dilakukan Amerika di Filipina. Konferensi ini menghasilkan beberapa putusan, di antaranya berkaitan dengan pengalihan kekuasaan kemiliteran Filipina dari Jenderal Ver ke tangan Jenderal Fidel Ramos, kepala Kepolisian dan *Integrated National Police* Filipina. Persaingan Jenderal Fidel Ramos dan Fabian Ver dalam mendapatkan jabatan tertinggi dalam tubuh militer menjadi peluang bagi golongan oposisi untuk memanfaatkannya. Hal ini berkaitan erat dengan usaha Amerika

Serikat untuk dapat menguasai militer dalam kubu Marcos (Nadeak K. dan Atmadji, 1986:51).

Pemberontakan Pasukan Militer RAM

Protes dari kalangan perwira-perwira muda Angkatan Bersenjata Filipina yang masih menjunjung tinggi integritas Militer berujung pada pembentukan gerakan pembaharuan (*Revormis Movement*) atau RAM. Gerakan RAM cukup cepat dalam perkembangannya, pada tanggal 15 Maret 1985 anggota gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari 80 Perwira Angkatan Bersenjata. Selama perkembangannya, gerakan ini mampu menarik lebih dari 2.000 anggota dari kalangan militer pemerintahan Marcos (Nadeak K. dan Atmadji 1986:55).

Bentuk konspirasi yang dilakukan Amerika Serikat melalui RAM lebih bersifat radikal. Keberhasilan CIA menarik Enrile untuk bergabung dengan gerakan RAM pada tahun 1985 menjadikan gerakan ini makin kokoh untuk melakukan kudeta. Melemahnya kekuatan Marcos dalam mendapatkan kepercayaan rakyat serta pemberhentian sementara Jendral Ver sejak 1984 merupakan alasan kuat RAM untuk segera melakukan kudeta. Namun karena kondisi politik dengan adanya laporan pencalonan janda Senator Aquino, Corry Aquino untuk maju dalam pemilu 1986 rencana kudeta pada Natal tahun 1985 ditunda. Bahkan pada 22 Februari 1986, karena adanya tekanan dari pihak pemerintah Marcos, rencana kudeta yang kedua gagal dan RAM beralih kekubu oposisi di bawah kepemimpinan Cory Aquino-Doy Lauren (Jajak MD dan Sudarmin, 1989:57).

Intervensi Dalam Bidang Politik

Presiden Reagan berusaha memberikan dukungan kepada Ferdinand melalui bantuan-bantuan politik. Melalui para Senator yang ditunjuk Reagan baik secara resmi maupun tidak resmi untuk memberikan saran serta solusi dari tekanan yang diberikan Washington melalui Enrile dan Ramos dalam gerakan pemberontakan RAM. Intervensi yang dilakukan oleh Washington dan CIA kepada pemerintahan Ferdinand E. Marcos di Filipina melalui jalur militer, telah menyudutkan kedudukan Marcos dalam perpolitikan di negaranya. Meskipun setelah melihat perkembangan yang ada, setelah kemenangan Corry Aquino pada pemilu 7 Februari 1986 menjadikan bantuan yang dikirim Reagan lebih bersifat intervensi.

Diplomasi Senator Amerika Serikat

Pengiriman para Senator ke Filipina oleh Presiden Reagan merupakan tindakan Reagan untuk membantu Marcos dalam menanggapi gejolak politik yang menyudutkan posisi Marcos. Kedatangan Paul Laxalt pada 10 Oktober 1985, Jerry Farwell pada 10 November, dan Philip Habib pada 14 Februari 1986 tidak memberikan jaminan kepada Reagan terkait kedudukan Marcos di pemerintahan Filipina. Kegagalan Presiden Reagan dalam membantu Ferdinand E. Marcos melalui para Senatornya bukan hanya karena sikap keras kepala Marcos, namun karena faktor lainnya. Keberhasilan pihak oposisi di pihak Amerika Serikat dalam menekan Presiden Reagan juga turut berperan dalam kegagalan rencana para senator tersebut. *People power* yang dibangun pendukung Cory Aquino untuk menjatuhkan kekuatan Marcos menjadi poin utama kegagalan para Senator dalam kesuksesan kemenangan Marcos. Terlebih setelah putusan Ramos dan Enrile pada 22 Februari berubah haluan mendukung oposisi, turut merubah pendirian pendukung Reagan dalam pemerintahan untuk menyetujui pihak oposisi menjatuhkan Marcos dari jabatannya (Ricklefs, 2013:641).

Pengalihan Dukungan Kepihak Oposisi

Beralihnya sekutu kekubu oposisi Pemerintahan Reagan di Amerika Serikat memaksa presiden Reagan menyetujui usulan Washington dan Gedung Putih. Intervensi-intervensi bawahan Presiden untuk segera mengakhiri konspirasinya dengan Marcos juga menjadi intervensi yang cukup berhasil dalam merubah keputusan Reagan untuk menyetujui rencana Gedung Putih mengalihkan dukungannya ke pihak Aquino. Juan Ponce Enrile beserta Jenderal Videl Ramos yang memutuskan untuk berpaling ke kubu pemenangan Aquino menjadi tanda bahwa meskipun tanpa keputusan Presiden, jajaran elit Amerika telah sepakat untuk menggantikan Marcos dengan Corri Aquino sebagai penggantinya (Seagrave, 1988:503).

Dukungan Amerika Serikat kepada Corazon Aquino mulai nampak jelas paska pemilihan presiden pada 7 Februari 1986 dilaksanakan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Amerika Serikat akan tercoreng nama baiknya dimata dunia jika tetap membiarkan hal ini terjadi. Meskipun sejak lama pihak Amerika terlihat membiarkan kediktatoran Ferdinand E. Marcos saat memerintah, namun pemilihan pada 7 Februari ini telah disoroti oleh berbagai media masa Internasional. Oleh area itu, untuk menjaga nama baik Amerika Serikat dimata dunia, Pemerintahan Ragan harus mau bersifat professional dalam menanggapi permasalahan di Filipina (Ellison dalam Intisari, 1989:179).

DAMPAK INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM PERISTIWA PELENGSERAN PRESIDEN FERDINAN E. MARCOS DI FILIPINA TAHUN 1983-1986

Lengsernya Presiden Marcos dari kursi Kepresidenan Filipina berdampak pada keadaan dalam negeri Filipina, baik itu dalam sektor Ekonomi, Sosial dan Politik. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintahan Aquino telah membawa perubahan yang positif pada negara maupun masyarakat Filipina. Lengsernya Ferdinand E. Marcos tidak hanya berdampak pada kondisi dalam negeri Filipina saja, namun juga pada negara-negara disekitarnya termasuk Amerika Serikat. Keberhasilan Amerika melakukan intervensi jelas berimbas pada kedudukan Amerika Serikat baik di Filipina sendiri maupun di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Jatuhnya Kekuasaan Presiden Ferdinand E. Marcos dan Munculnya Cory Aquino

Perbedaan pengumuman hasil pemilihan antar NAMFREL dengan COMELEK mendorong rakyat untuk melakukan makar. Keyakinan rakyat Filipina atas kemenangan Aquino-Lauren atas Marcos-Tolentino menyebabkan rakyat Filipina melantik Cory Aquino-Lauren tanpa melalui lembaga-lembaga pemerintah. Rakyat Filipina menyadari bahwa kemenangan Cory Aquino berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan NAMFREL tidak mungkin disahkan secara konstitusional. NAMFREL menyatakan bahwa 7.835.070 untuk kemenangan Cory Aquino, dengan Marcos meraih suara 7.053.068 suara, sedangkan COMELEK Marcos mendapatkan suara sebesar 10.807.197 sedangkan Cory mendapatkan suara hanya 9.291.716. Hampir disemua kawasan pemilihan terdapat pembengkakan jumlah pemilih, terutama pada kawasan-kawasan pedesaan seperti di kawasan Taai-tawai jumlah suara pemilih mencapai 103%, Danao City dari 98% pemilih bertambah 1% keangka 99% jumlah pemilih. Hal inilah yang memaksa rakyat Filipina melantik Cory-Lauren sebagai presiden dari rakyat Filipina sebagai *People power* tandingan bagi pemerintahan Marcos-Tolentino (Nadeak K. dan Atmadji, 1986:132).

Selasa tanggal 25 Februari 1986 Cory-Lauren dan Marcos-Tolentino dilantik menjadi Presiden Filipina pada dua acara yang berbeda. Cory Aquino dan Doy Lauren dilantik oleh rakyat Filipina tanpa melalui konstitusi dengan hanya berlandaskan *Vox populi* (suara rakyat suara Tuhan). Ferdinand E. Marcos dengan Tolentino dilantik berdasarkan konstitusi 1973 yang telah berlaku. Pemerintahan Aquino bersifat

pemerintahan revolusioner yang mendapatkan pengakuan secara *de jure*, sedangkan pemerintahan Marcos bersifat resmi secara *de facto*. Setelah pelatikan atas diri Marcos, para pemberontak mulai melakukan aksi di depan Istana Malacanang, terjadi beberapa tembakan yang diarahkan ke Istana. Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, Marcos beserta keluarganya meninggalkan Istana Malacanang demi keamanan dirinya dan seluruh keluarganya (Seagrave, 1996: 506).

Timbulnya Perubahan Dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Sosial

Langkah awal Carazon Aquino sebagai Presiden setelah resmi dilantik pada 25 Februari 1986 adalah segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya. Fidel Ramos tetap menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, sama halnya dengan Juan Porce Enrile yang tetap menduduki Menteri Pertahanan. Untuk urusan perbankan Aquino menunjuk Jose Fernandes tetap memegang jabatannya sebagai Gubernur Bank Sentral. Untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahannya, Aquino juga mengangkat nama-nama dari berbagai golongan lainnya. Seperti halnya Jaime Ogpin, Jose Conception dari NAMFREL dan perwakilan dari UNINDO adalah Salvador Lauren. Meskipun terpilih sebagai Wakil Presiden, Lauren merangkap menjadi Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Filipina (Thoyib, 1986:79).

Selain pembenahan birokrasi pemerintahan, Presiden Aquino juga segera menanggapi permasalahan komunis di negaranya. Aquino segera membebaskan pendiri serta pemimpin Partai Komunis Filipina, Jose Maria Sison. Selain Sison, Aquino juga melepaskan beberapa tokoh penting Filipina yang telah ditahan oleh pemerintahan Marcos, Burnabe Buscayo bekas pimpinan gerilya NPA; Alex Berondo dan Ruben Alegre dua tokoh berpengaruh dalam pemberontakan NPA; serta pembebasan 513 tahanan politik lainnya (Jajak dan Sudarmin, 1989:70).

Dalam bidang Ekonomi, Aquino melakukan penekanan laju kemerosotan ekonomi dengan mengkalkulasi hutang-hutang negara, menghapus kontrol impor dan monopoli serta memulai reformasi perdagangan menjadi langkah awal pemerintah. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tajam antara tahun 1986 hingga tahun 1987 yang menginjak keangka 5% dari tahun sebelumnya. Perbaikan ini banyak disumbang dari peningkatan konsumsi, baik dari kebutuhan pokok maupun dari kebutuhan sekunder. Sektor konstruksi dan konsumsi barang-barang tahan lama juga turut menyumbang pertumbuhan perekonomian negara ini (Bresnan, 1988:341).

Merosotnya Pengaruh Amerika Serikat di Filipina dan Negara-negara Asia Tenggara Lainnya

Dikeluarkannya Undang-undang Anti Nuklir oleh pemerintah Corry Aquino telah membatasi peranan militer Amerika Serikat di Filipina. Munculnya Undang-undang tersebut tentu juga berdampak pada kedudukan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara lainnya. Terlebih sikap negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN mulai menunjukkan sikap mandiri dari kepentingan asing (Jajak dan Sudarmin, 1989:102).

Sikap negara-negara Asia Tenggara dalam hal netralitas sudah ditunjukkan sejak Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971. Lebih jauh lagi sikap netralisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara sudah dikumandangkan yang dimuat dalam Konferensi Bandung pada tahun 1955 (Abdulgani, 1978:32). Pada deklarasi ini negara-negara ASEAN menghendaki pembentukan kawasan damai, bebas dan netral diseluruh kawasan Asia Tenggara, baik dari intervensi luar negeri maupun konflik-konflik regional. Sikap negara-negara ASEAN tersebut jelas menunjukkan sikap non-intervensi dari negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Terlebih adanya negara seperti Filipina yang menunjukkan

sikap netral mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya lebih berani melawan intervensi negara-negara barat termasuk Amerika Serikat (Scalapino, 1985:15).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian di atas, maka kesimpulan dan saran dari kajian ini meliputi latar belakang Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap pemerintahan Marcos terdiri dari tiga sebab utama, yaitu krisis yang semakin bertambah parah; perkembangan komunistik; dan; perberbedaan pendapat antar golongan elit Amerika Serikat. Munculnya intervensi oleh Amerika Serikat bukan hanya karena kesenjangan sosial masyarakat Filipina pada waktu itu, akan tetapi lebih kearah kepentingan secara politis dan ekonomi Negara Amerika Serikat. Faktor kemerosotan ekonomi Filipina mendapat sorotan dunia untuk menarik investasi dari Filipina, sehingga kondisi tersebut memaksa peran Amerika Serikat untuk menjaga kedudukannya di Filipina baik secara politik, sosial dan ideologi.

Bentuk-bentuk intervensi terus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat demi tetap menjaga kedudukannya di Filipina. Munculnya perpecahan dalam kubu militer menjadi jalan Amerika Serikat melaksanakan intervensi tersebut. Jendral Videl Ramos dan Juan Ponce Enrile menjadi aktor penting dalam konstilasi politik persekongkolan dengan pihak Amerika untuk menjatuhkan pemerintahan Marcos. Meskipun pada akhirnya dengan munculnya "*People Power*" atas kemenangan oposisi Corason Aquino dalam pemilu 7 Februari 1986 pemerintahan Amerika Serikat secara penuh menuntut Ferdinand E. Marcos untuk turun dari jabatannya sebagai presiden Filipina di Malacanang.

Dampak dari intervensi merubah tatanan sosial masyarakat Filipina. Hal tersebut menciptakan tatanan politik baru yang secara langsung wujud Intervensi yang berhasil dilakukan Amerika Serikat untuk menjatuhkan Marcos dari jabatannya melalui persekongkolan dengan pihak ketiga sangat mempengaruhi pandangan masyarakat Filipina. Keberhasilan Corason Aquino merebut kekuasaan dari tangan Marcos mendorong rakyat Filipina untuk segera melepaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya peran pemerintah Amerika Serikat dalam membantu perbaikan dan perkembangan negara Filipina cukup besar. Meskipun akibat dari Intervensi tersebut mempersempit kedudukan Amerika Serikat baik di Filipina maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara disekitarnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu: bagi pemerintah, penulis mengharapkan agar dapat dijadikan teladan dalam menyelesaikan konflik antar negara, dan dampak konflik yang ditimbulkan akibat dari pengaruh asing; dan bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber penelitian mengenai Sejarah Asia Tenggara khususnya mengenai peranan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara khususnya di negara Filipina.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barkun, M. (2003). *A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America*. Berkeley: Universitas of California Press.
- Bayan KO. "Revolusi Rakyat di Filipina", *TSM: Teknologi & Strategi Militer*, 1 Februari 1988.
- Bresnan, J. (Eds.). (1988). *Krisis Filipina: Zaman Marcos dan Keruntuhannya*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Ebenstein, W. (Ed.). (2014). *Isme-isme yang mengguncang Dunia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Fenster, M. (1999). *Conspiracy Theory: Secresy and Power in Amerikan Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Francis W, ed.Keith W. O. (2004). *Garis Besar Sejarah Amerika*. Deplu AS.
- Jajak dan Sudarmin, HG. (1989). *Hari-hari Akhir F. Marcos*. Jakarta: Matro Pos
- Kerrigan, M. (2015). *Sejarah Gelap Presiden Amerika Serikat*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Kusuma D. I. (2015). “Kudeta Militer Terhadap Pemerintah Carazon Aquino 1986-1990”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Fakultas Sastra. Jember: Universitas Jember.
- Kusumohamidjojo, B. (1985). *Asia Tenggara dalam Perspektif Netralitas dan Netralisme*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Mangandaralam, S. (1988).*Mengenal Dari Dekat Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- Murtamadji. (2009). *Kegagalan Perang Dingin Antar Dua Negara Adidaya: Faktor Penyebab dan Implikasinya(9 vols.)*. Humanika
- Nadeak, K. dan Atmadji. (1986). *Revolusi Damai: Rekaman Kemelut di Filipina*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklef, M. C. (Eds.). (2012). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Ricklef, M. C., Lockhart B., Lau A., dll. (Ed.). (2013). *Sejarah Asia Tenggara dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer (2nd ed.)*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sadiman A. M. (1983). *Analisis Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Politik di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Liberty.
- Salmah, L. (2008). *Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme vs Komunisme*. Media Jurnal Global dan Strategi, (Vol. 2): 1.
- Scalapino, R. A. (Ed.). (1985). *Sejarah Asia Tenggara Dalam Tahun 1980-an*. Jakarta: Centre Stratagic and International Studies.
- Seagrave, S. (Eds.). (1996). *Dinasti Marcos: Korupsi Harta dan Kekuasaan di Filipina*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- ST, AM, esn. “Kudeta Berdarah di Filipina”. Warnasari. No. 105, Oktober 1987
- Sugianto. (1997). “Intervensi Amerika Serikat dalam Perang Vietnam”. Laporan Penelitian. Jember: Lemlit Universitas Jember.

Sugiertik, D. (2009). "Filipina Pada Masa Kekuasaan Marcos tahun 1965-1986 (Study Kasus Runtuhnya Kekuasaan Marcos)". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Fakultas Sastra. Jember: Universitas Jember.

Thayib, A. (1986). *Jatuhnya Sang Diktator Marcos*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Wanandi J. "Analisa 1981-10: Peranan Amerika di Kawasan Pasifik". CSIS: Centre for Strategic and Interational Studies, 10 Oktober 1981.